

Peran Perantau dalam Pembangunan Nagari Perspektif Collaborative Governance (Literature Review)

Indry^{1*}, Yulia Ningsih²

^{1,2}Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: indry.map@gmail.com

Abstract

The limited resources owned by the government in the development process in the regions, ultimately require the role of various parties or stakeholders involved in helping accelerate the development process and the success of development in the regions. Collaboration is a participatory development concept with various indicators which are expected to help realize participatory development if implemented. The concept of collaborative governance between nomads and the nagari government is an effective form of collaboration in realizing the success of nagari development. This study aims to describe the role of nomads in development in Nagari. The research method used in this research is qualitative method and literature study or library research. The conclusion of this study is that collaboration between nomads and the nagari government in the progress of physical and non-physical development in the nagari provides a new perspective on accelerating development in the regions. Through the role of nomads in channeling a number of budget funds, they can help accelerate development progress in the nagari.

Keywords: *Emigrant, Nagari Development, Collaborative Governance*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Marantau merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Banyaknya kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menunjukkan kekayaan yang dimiliki masyarakat. Apabila hal tersebut dipelihara sebagai sebuah kemajemukan bangsa kita, maka ini merupakan harta yang tidak ternilai dan dapat digunakan sebagai alat atau modal dasar sebuah harmoni bangsa (Samiyono 2017). Konsep rantau dilihat sebagai sesuatu yang menjanjikan harapan untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik, dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi dan bukan dalam konteks politik. Berdasarkan konsep tersebut, merantau adalah untuk pengembangan diri dan mencapai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan merantau sering dikaitkan dengan tiga hal: mencari harta (berdagang/menjadi saudagar), mencari ilmu (belajar), atau mencari pangkat (Navis, 1999).

Faktor yang mendorong suatu masyarakat merantau adalah faktor ekonomi yang cenderung semakin banyak pengeluaran dengan membutuhkan pemasukan yang lebih besar. Selain dari faktor pendorong dari daerah asal, ada juga faktor penarik dari kota seperti peluang kerja yang besar dan beragam serta jaminan kesuksesan ketika pergi merantau. Merantau umumnya menjadi keharusan bagi setiap bujang di nagari, karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, si bujang tersebut akan ikut sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat (Kato 2005).

Perantau merupakan bagian dari masyarakat nagari yang memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan di nagari, peran yang selama ini telah dilakukan oleh para perantau melalui penyaluran dana yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik di nagari. Perantau yang merupakan bagian dari anak nagari memiliki tanggung jawab atas kemajuan nagari-nya. Walaupun perantau tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pembangunan di nagari, namun perannya dalam penyaluran dana menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di nagari.

Penelitian Annisa Aulia Putri (2019) menyatakan bahwa berdasarkan data pembangunan mulai tahun 2008-2016, persentase sumber pendanaan pembangunan paling banyak berupa swadaya masyarakat yang dikumpulkan dari perantau. Pada tahun 2010, pembangunan banyak dilakukan untuk peningkatan sarana dan prasarana umum, seperti jalan kapalo koto, irigasi Jaruangan, cor jalan gobah, pembuatan korong banda, dan lain-lain, dan kegiatan sosial keagamaan seperti qurban dan Baz Nagari Sungai Pua. Penelitian Syamsurizaldi, Putri, dan Antoni (2019) menemukan bahwa perantau adalah salah satu aktor kunci yang ikut berkolaborasi dalam penyelenggaraan nagari rancak di Sumatera Barat. Besarnya perhatian perantau terhadap kemajuan kampung halamannya, ternyata berkontribusi terhadap kemajuan nagari.

Penelitian Vivi Emita, Zuzmelia & Marleni (2013) menemukan bahwa Dampak merantau berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Galogandang dapat dilihat secara fisik dan non fisik. Peran perantau terhadap pembangunan di Galogandang dapat terlihat dari berbagai perkembangan dan perbaikan fasilitas umum seperti mesjid, sumber air bersih, lapangan sepak bola. sedangkan pembangunan secara non fisik berupa beasiswa pendidikan atau berupa bantuan dalam bentuk uang sebagai penghargaan untuk anak-anak yang berprestasi tapi

orang tuanya tidak mampu, beasiswa tersebut diberikan untuk tingkat SMP sampai PT (Perguruan Tinggi). Sumber dana pembangunan yang telah dilakukan di Galogandang diperoleh dari sumbangan perantau dan anggaran pembangunan daerah.

Terlihat jelas disini bagaimana pentingnya peran perantau untuk pembangunan daerahnya, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat nagari yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan suatu perencanaan demi kemajuan daerahnya. Peran perantau dalam pembangunan nagari disini merupakan bentuk dari kolaborasi antara pemerintah nagari dan perantau. Kolaborasi bukan sekedar dimaknai sebagai berkumpul dan bermusyawarah bersama-sama. Kolaborasi memiliki makna yang luas dan disertai konsep aktivitas yang jelas (Desna Aromatica, 2021).

Kolaborasi menurut Hanida (2017) adalah kerjasama dan hubungan antar organisasi yang disepakati bersama-sama melalui proses komunikasi. Sementara Benton (2013)) menyatakan bahwa kolaborasi dalam penyediaan layanan publik yang melibatkan dua atau lebih tingkatan pemerintahan (nasional, regional, daerah dan lokal) tidak jarang terjadi kolaborasi harus dilakukan dengan berbagai cara atau strategis). Anshell dan Gash menjelaskan collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13).

Kolaborasi antara perantau dengan pemerintah nagari dalam kemajuan pembangunan fisik maupun non fisik di nagari memberikan perspektif baru terhadap percepatan pembangunan di daerah. Keterbatasan anggaran daerah yang tidak bisa menopang seluruh kebutuhan pembangunan di daerah membutuhkan kerja sama kolaborasi dengan stakeholder lain yaitu peran perantau yang mampu menjawab keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Melalui peran perantau dalam menyalurkan sejumlah anggaran dana dapat membantu percepatan kemajuan pembangunan di nagari.

Kajian Pustaka

Menurut O'Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan collaboration sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "public value" ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan collaborative governance adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Selanjutnya Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan collaborative governance tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "multi-partner governance" yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "hybrid" seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk (Subarsono, 2011) mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan Perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami collaborative governance merupakan cara pengelolaan "sesuatu hal" yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Perantau Minang (disebut sebagai Diaspora Minang) adalah sebutan bagi orang-orang Minangkabau yang hidup di perantauan atau di luar tanah asalnya (Kato, Tsuyoshi. 2005). Perantau merupakan bagian dari masyarakat nagari yang kemudian membentuk sebuah perkumpulan organisasi yang memiliki tujuan untuk memajukan nagari. Perantau Minang merupakan masyarakat yang jumlahnya diperkirakan setara walaupun tidak lebih banyak daripada orang Minang yang ada di tanah asalnya, ranah Minangkabau. Mereka menjalani kehidupan di tanah rantau disebabkan beberapa faktor, seperti eksistensi diri, adat matrilineal, perang, dan faktor ekonomi, serta beragam motivasi, yaitu mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemasyhuran.

Terbatasnya anggaran pemerintah dalam mewujudkan kegiatan pembangunan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk dapat membantu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Perantau merupakan bagian dari bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk komunitas sipil yang memiliki kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan. Komunitas perantau berperan dalam menyalurkan sejumlah dana dalam kegiatan pembangunan di nagarinya. Berbagai fasilitas umum nagari dibangun bersumber dari dana yang berasal dari perantau, bantuan ekonomi dalam rangka menyelamatkan kondisi dimasa krisis juga menjadi bagian dari peran perantau dalam mewujudkan kegiatan

pembangunan di nagari. Hal ini menjadi bagian dari proses pembangunan didaerah atas dasar wujud dari adanya kolaborasi (collaborative governance) antara pemerintah dan perantau.

Metode Penelitian

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Mengkaji teori dan menelaah buku-buku literatur yang sesuai dengan teori yang dibahas, khususnya mengenai collaborative governance. Disamping itu juga menganalisis artikel- artikel dan jurnal ilmiah yang bereputasi dan yang belum bereputasi.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013). Pada tahap selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul "pustaka terkait" (Related literature) atau "kajian pustaka" (Review literature), sebagai dasar dari perumusan hipotesis dan pada tahap akhir kedua literatur ini menjadi dasar dalam melakukan perbandingan dengan hasil dan temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (H. Ali & Limakrisna, 2013).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam proses pembangunan didaerah, pada akhirnya membutuhkan peran dari berbagai pihak ataupun stakeholder yang terkait dalam membantu percepatan proses pembangunan dan keberhasilan pembangunan didaerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Masyarakat diharapkan keterlibatannya dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini supaya pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan perlu dilakukan secara bersama-sama yang disebut dengan kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu konsep pembangunan partisipasi dengan berbagai indikatornya yang diharapkan jika dijalankan akan membantu terwujudnya pembangunan yang partisipatif. Perlu adanya Konsensus bersama dalam pembangunan antar stake holder di nagari, terlaksananya kepemimpinan kolektif, komunikasi multi arah antar stake holder dan berbagi sumberdaya. Hal ini akan mendorong penguatan kapasitas pemerintahan nagari yaitu kapasitas infrastruktur, sumberdaya, keuangan dan lingkungan sehingga tercapainya kapabilitas dalam pemerintahan nagari (Desna Aromatica, 2021).

Posisi nagari sebagai entitas yang multi aset akan menjadi pengayuh pembangunan. Nagari tidak semestinya hanya bergantung pada dana desa, namun dapat menemukan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan memaksimalkan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset Nagari, perantau dan kekayaan nagari lainnya. Perantau selama ini menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan di nagari. Adapun bentuk swasembada masyarakat bersama perantau yang telah terjalin sampai saat ini telah membawa perubahan yang lebih baik dalam proses percepatan pembangunan dinagari. Perantau, yang merupakan masyarakat yang tidak menetap di kampung, berpartisipasi dengan cara memberikan bantuan berupa dana yang dikirimkan melalui keorganisasian perantau, Dorongan yang tinggi untuk membangun Nagari membuat masyarakat rantau dengan suka rela menyumbang organisasi perantau untuk disalurkan kepada Nagari.

Sebagai orang Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan sebagai ciri dasar orang Minangkabau, dan memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi baik dalam lingkungan kampung atau pun saudara sekaum dan sesukunya. Sehingga raso banagari merupakan bentuk ekspresi nilai kecintaanyang tinggi terhadap kampung halamannya. Salah satu bentuk perwujudan raso banagari adalah ikut berpartisipasi dalam pembangunam nagari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian tentang kontribusi perantau asal Sumatera Barat telah dilakukan beberapa peneliti di antaranya penelitian Pristiyanilicia Putri (2018) yang menemukan bahwa perantau sangat berperan dalam upaya recovery kampung pasca gempa di Sumatera Barat 30 September 2009 dengan membangun sarana sosial dan sarana umum yang rusak seperti membangun surau, sekolah, masjid, rumah kerabat dan sebagainya.

Perantau memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan di Nagari Sungai Pua, dimana hal ini sudah menjadi marwah turun temurun dimasyarakat Sungai Pua. Adapun bentukswasembada masyarakat bersamaperantau yang telah tersalurkan sejak tahun 2008-2013 sebesar Rp 24 miliar. pembangunanbanyak dilakukan untuk peningkatansarana dan prasarana umum, seperti cor jalan kapalo koto, irigasi Jaruangan,cor jalan gobah, pembuatan korong banda, dan lain-lain, dan kegiatan sosial keagamaan seperti qurban dan Baz Nagari Sungai Pua (Annisa Aulia Putri, 2019).

Selanjutnya, perantau juga merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan di nagari. Penelitian Annisa Aulia Putri, 2019 menemukan bahwa dalam pembangunan kantor wali

nagari, 65% menggunakan swadaya masyarakat, yang merupakan hasil dari swadaya rantau, dan 35% dari Alokasi Dana Desa. Dapat terlihat jelas bahwa anggaran dana yang disalurkan oleh perantau mendapati presentasi yang lebih besar dibanding dengan presentasi anggaran dana desa oleh pemerintah. Oleh sebab itu, peran perantau dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan nagari.

Konsep collaborative governance dalam hal ini berjalan efektif dalam pembangunan nagari. Kolaborasi antara perantau dengan pemerintah nagari berjalan dengan baik dengan terbentuknya pola komunikasi dan koordinasi antara perantau dengan pemerintah nagari sehingga keberhasilan pembangunan nagari dapat terwujud dengan baik. Selain itu, Nagari Sungai Pua juga terpilih masuk sembilan besar Nagari terbaik di tingkat nasional dalam lomba gotong royong (Andriansyah, 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa semangat gotong royong masyarakat nagari bersama perantau sangat tinggi dalam pembangunan nagari. Hal ini semakin membuktikan bahwa konsep collaborative governance dalam pembangunan dapat berhasil dilakukan dengan baik.

Menurut Goldsmith dan Kettl, terdapat hal penting yang bisa dijadikan sebagai kriteria keberhasilan collaborative governance, yaitu networked structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, dan access to resources (Goldsmith dan Donald, 2009). Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Collaborative governance dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang dilaksanakan akan terlaksana lebih efektif karena melibatkan relasi organisasi atau institusi.

Aspek kesukarelaan perantau Galogandang juga memiliki peran yang besar dalam pembangunan nagari, keorganisasian perantau nagari Galogandang yang berada di daerah rantau begitu akrab dan masih tetap memiliki tujuan utama yaitu memajukan pembangunan Nagari. Keakraban tersebut dapat dilihat dengan adanya organisasi perantau Galogandang di setiap daerah perantau. Terbentuknya organisasi perantau Galogandang menunjukkan adanya rasa kekeluargaan dan persatuan yang kuat para perantau demi memajukan pembangunan nagari. Dengan adanya organisasi perantau diharapkan dapat mempermudah dalam mengkoordinir perantau dalam mengumpulkan sejumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan di nagari.

Hal lain yang dapat terlihat dari peran dan partisipasi perantau dalam kolaborasinya dengan pemerintah nagari adalah dengan dibangunnya mesjid Akbar Galogandang, pembangunan mushala, pembangunan sekolah TPA (taman pendidikan AL-Qur'an). Sejak masyarakat Galogandang banyak yang merantau, pembangunan di kampung pun menjadi bangunan yang megah seperti yang ada di kota. Rumah-rumah penduduk yang bagus dan mewah, seperti perumahan yang ada di kota. Pembangunan mesjid yang sudah terlihat rapi dengan fasilitas yang ada sekarang tidak lagi sama dengan fasilitas yang ada dulu. Selain dari pembangunan secara fisik, pembangunan secara non fisik juga ada yaitu seperti adanya program beasiswa dari perantau untuk anak yang berprestasi tetapi ekonomi keluarganya rendah. Beasiswa tersebut diberikan untuk tingkat sekolah SMP hingga Perguruan Tinggi. Selain dari memberikan beasiswa untuk pendidikan anak Galogandang, perantau Galogandang juga memberikan suatu peluang kerja di rantau dengan cara membawa anak Galogandang yang tidak lagi sekolah ataupun yang tidak memiliki pekerjaan di kampung. Perantau mencari pekerjaan untuk orang yang mereka bawa dari kampung dan juga memberikan tumpangan tempat tinggal sampai orang yang dari kampung tersebut sudah bisa memiliki tempat tinggal sendiri (Vivi Emita, Zusmelia dan Marleni, 2013).

Disisi lain, peran perantau dalam pembangunan nagari bukan hanya diwujudkan melalui penyaluran anggaran dana yang dihimpun dari para perantau dalam pembangunan di nagari. Namun lebih luas daripada itu, kontribusi perantau dalam memajukan pembangunan nagari diwujudkan melalui kerja sama yang terjalin bersifat sustainable. Seperti halnya di nagari Sumanik juga telah mendesain institusinya untuk menunjang kerjasama dengan perantau, yaitu dengan memasukkan unsur rantau ke dalam visi dan misi Nagari Sumanik, serta membuat sebuah bidang yang khusus menangani rantau seperti yang ada di Kabupaten dan Provinsi. Antara Pemerintahan Nagari Sumanik dengan perantau juga tidak terhubung dengan garis komando namun lebih kepada garis koordinasi. Untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam pembangunan, pemerintah nagari telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk segala ide dan gagasan dari aktor jaringan yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan Nagari Sumanik. Asalkan ide tersebut tidak menentang dengan peraturan atau adat istiadat yang ada di Nagari Sumanik. Hal tersebut juga telah membangun kepercayaan perantau karena merasa kehadiran

dan peran perantau berguna bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di Nagari Sumanik dan pada akhirnya membuat hubungan kerjasama yang terjalin bersifat sustainable (Miftahul Viona Sari, 2020).

(Junaidi, 2015) menyebutkan bahwa Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Adanya inisiatif pemerintah daerah setempat yang melibatkan perantau dalam visi dan misi Nagari Sumanik, serta membuat sebuah bidang yang khusus menangani rantau seperti yang ada di Kabupaten dan Provinsi merupakan wujud dari adanya inisiatif pemerintah nagari dalam berkolaborasi dengan perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan nagari.

Di bidang ekonomi banyak program yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh perantau Sulit Air. Pada masa Rainal Rais Dt. Rajo Satie nan Mulie, misalnya. Ketika kondisi ekonomi masyarakat Sulit Air di kampung sedang merosot, sehingga terkenal sebagai “kota wesel” ia berupaya mendirikan BPR Surya Katialo yang modalnya dimiliki oleh masyarakat Sulit Air, manfaatnya pun sangat dirasakan oleh masyarakat; di seluruh kecamatan X Koto Di Atas. Bantuan program pengolahan lahan kritis, hortikultura tidak terlepas dari lobi kaum perantau Sulit Air. Pemberian 500 ekor sapi untuk ditanamkan juga atas dukungan kaum perantau yang sama sekali tidak mengharapkan imbal balik dari hasilnya. Peran perantau tidak hanya sekedar berkontribusi percepatan kemajuan pembangunan nagari, namun perantau juga berperan besar dalam memperbaiki kondisi ekonomi nagari ketika mengalami krisis. Menyumbangkan hasil pemikiran melalui program-program perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dengan pemberian modal usaha kepada masyarakat demi memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat nagari menuju keadaan yang lebih baik. Upaya lain yang telah dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan industri rumah tangga (home industri), yaitu usaha pembuatan perangkat tikus dan pemanggang daging yang terbuat dari kawat. Mulanya memberikan prospek yang baik, tapi hilang ditengah jalan begitu saja (Addiarrahman, 2013).

Namun disisi lain, kontribusi perantau dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pada masa krisis tidak diikuti dengan kemampuan masyarakat nagari dalam memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan program usaha yang diberikan perantau mengakibatkan kegagalan usaha tersebut. Keberlanjutan program secara jangka panjang juga tidak dapat terwujud akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Hal ini tentu menjadi perhatian kedepannya, bahwa pemberdayaan masyarakat nagari oleh para perantau menjadi focus yang dapat dipertimbangkan kedepannya, demi mewujudkan perkembangan pembangunan nagari oleh perantau secara sustainable. Dengan demikian, peran perantau bukan hanya sekedar menyalurkan dana saja namun lebih luas daripada itu perantau juga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat nagari dalam mengelola nagari dan melaksanakan kemajuan pembangunan nagari dari segala aspek.

Adapun nagari yang perantainya tidak memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan nagari, adalah Nagari Selayo Kecamatan Kubung. nagari Selayo memiliki organisasi perantau, yang setiap daerahnya memiliki nama yang berbeda. Tetapi, hubungan perantau dengan Pemerintah nagari tidak terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya sumbangan organisasi perantau dalam bentuk ide dan gagasan untuk Pembangunan nagari. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas. Perantau Nagari Sulit Air sudah memiliki organisasi perantau yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Organisasi perantau di Sulit Air bernama SAS, yang memiliki Dewan Pengurus Pusat. Dalam tahap perencanaan pembangunan, pemerintah nagari yang biasanya diwakili oleh wali nagari menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bersama perantau. Mukernas dilakukan sebelum menyusun RAPBNag. Permintaan saran ini dilakukan oleh pemerintah nagari karena perantau secara legal tidak diperbolehkan untuk mengikuti Musrenbang. Kesempatan untuk mendapatkan ide dan saran bagi pengembangan pembangunan nagari juga didapatkan oleh pemerintah pada saat pemerintah nagari melakukan kunjungan ke tempat perantau serta pada saat para perantau pulang basamo (Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, Miftahul Viona Sari, Ridho Yoliandri: 2020).

Ketidakhadiran perantau dalam menyumbangkan pikiran dalam pembangunan nagari tentu memberikan dampak yang kurang baik terhadap kemajuan nagarinya. Karena dalam proses perencanaan pembangunan , pemerintah nagari biasanya melibatkan perantau dalam mendapatkan ide dan saran bagi pembangunan nagari. Perantau dalam hal ini dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih maju diharapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan ide-ide cemerlang yang dapat membantu kemajuan pembangunan nagari melalui program-program dan inovasi dalam percepatan pembangunan nagari.

Kolaborasi yang terbentuk antara perantau dan pemerintah nagari dalam kemajuan pembangunan nagari dapat menunjang percepatan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di nagari. Partisipasi perantau dalam kegiatan pembangunan sangat diperlukan dalam mengisi ruang kosong pembangunan nagari (Syamsurizaldi et al. 2018). Dalam mewujudkan collaborative governance yaitu kolaborasi antara perantau dan pemerintah nagari harus dilakukan secara berkelanjutan, karena terbukti melalui beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa perantau memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan pembangunan dan membantu percepatan kemajuan pembangunan di nagari. Ketidakhadiran peran perantau dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan di beberapa nagari perlu dikaji lebih dalam. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani terbentuknya organisasi perantau yang aktif dalam pembangunan nagari.

Kesimpulan

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif yaitu dengan adanya kolaborasi antara perantau dengan pemerintah nagari. Konsep ini lahir dianggap menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Peran perantau selama ini memiliki peran yang besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan di nagari. Perantau merupakan bagian dari masyarakat nagari yang memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan di nagari, peran yang selama ini telah dilakukan oleh para perantau melalui penyaluran dana yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik di nagari. Perantau yang merupakan bagian dari anak nagari memiliki tanggung jawab atas kemajuan nagari-nya. Berdasarkan penelitian menemukan bahwa perantau memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan di nagari. Kontribusi perantau dalam kegiatan pembangunan dibuktikan dengan adanya penyaluran sejumlah anggaran dana yang dihimpun melalui organisasi perantau yang digunakan dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan nagari baik secara fisik maupun non fisik.

Kolaborasi antara perantau dengan pemerintah nagari dalam kemajuan pembangunan fisik maupun non fisik di nagari memberikan perspektif baru terhadap percepatan pembangunan di daerah. Keterbatasan anggaran daerah yang tidak bisa menopang seluruh kebutuhan pembangunan di daerah membutuhkan kerja sama kolaborasi dengan stakeholder lain yaitu peran perantau yang mampu menjawab keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Melalui peran perantau dalam menyalurkan sejumlah anggaran dana dapat membantu percepatan kemajuan pembangunan di nagari.

Dalam mewujudkan collaborative governance yaitu kolaborasi antara perantau dan pemerintah nagari harus dilakukan secara berkelanjutan, karena terbukti melalui beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa perantau memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan pembangunan dan membantu percepatan kemajuan pembangunan di nagari. Ketidakhadiran peran perantau dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan di beberapa nagari perlu dikaji lebih dalam. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani terbentuknya organisasi perantau yang aktif dalam pembangunan nagari.

Daftar Pustaka

- Addiarrahman. 2013. Baragiah Ka Kampuang: Spirit Filantropis Perantau Sulit Air. Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2013.
- Afful-Koomson dan Kwabena (2013), Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa. Africa: Pixedit Limited.
- Andriansyah. (2017). Antara Sumbar. Retrieved Oktober 25, 2017, from [www.antarasumbar.com: http://www.antarasumbar.com/berita/133949/sungai-puasembilan-besar-nagari-terbaiktingkatnasional.html?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news](http://www.antarasumbar.com:berita/133949/sungai-puasembilan-besar-nagari-terbaiktingkatnasional.html?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news)
- Annisa Aulia Putri. 2019. Partisipasi Perantau; Basamo Mambangun nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), Vol. IV Nomor 1, April 2019.
- Benton, J. Edwin (2013), Local Government Collaboration: Considerations, Issues, and Prospects. State and Local Government Review Vol. 45 (4).p. 220-223.
- Desna Aromatica. 2021. Nagari Membangun Dalam Perspektif Kolaborasi. Prosiding Seminar Nasional Peran Ilmu-Ilmu Budaya Dalam Pemajuan Kebudayaan. LPPM UNAND PRESS.

-
- Fitri Yolanda. 2020. Pola Pemanfaatan Remitan (Remittance) Perantau Nagari Atar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)* : Volume 6, No. 1 (April) 2020.
- Hanida, Rozidateno Putri, Bimbi Irawan, Syamsurizaldi, Wewen Kusumi Rahayu (2017), Collaboration of Stakeholders In Formation and Development Nagari-Owned Enterprise. *Policy & Governance Review*. Vol.1, Issue 3, p.213-227.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miftahul Viona Sari. 2020. Skripsi: Interactive Governance Dalam Pengelolaan Potensi Perantau Untuk Pembangunan Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
- Pristiyanilicia Putri. 2009. Peranan Urang Rantau Terhadap Pembangunan Masyarakat Nagari Pasca Gempa 30 September 2009. *Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018*, hlm. 497 – 502.
- Samiyono, David. 2017. “Membangun Harmoni Sosial: Kajian Sosiologi Agama tentang Kearifan Lokal sebagai Modal Dasar Harmoni Sosial.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 1(2):195–206.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok*. Sebelas Maret University Press.
- Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, Miftahul Viona Sari, Ridho Yoliandri. 2020. Raso Banagari: Ekspresi Sosial Perantau terhadap Pembangunan Kampung Halaman. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* – Vol 4, No 1 (2020), 1-16.
- Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, Suherdian Antoni. 2019. Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari | Volume 4 Nomor 1 Edisi Juni 2019* : 99- 121.
- Vivi Emita, Zusmeli, Marleni. 2013. Peran Perantau Terhadap Pembangunan Di Jorong Galogandang, Nagari Iii Koto Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Volume II Nomor 1, Januari-Juni 2013.